

Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Raldin Alif Al Hazmi
Politeknik Keuangan Negara STAN
Raldin_4132230021@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
9 Desember 2023

Dinyatakan Diterima
29 Juni 2024

ABSTRACT

Corruption is closely related to economic conditions in society. This research aims to analyze the influence of corruption on economic growth. Secondary data from 2018-2022 is used for panel data regression models in 34 provinces in Indonesia. Researchers found that the CPI (Corruption Perception Index) as an indicator of corruption in Indonesia has a negative but not significant effect on economic growth. Thus, it is recommended that the government and the general public collaborate in efforts to prevent corruption by increasing transparency and increasing public participation so as to create maximum economic growth.

Keywords : *Corruption, Economic Growth, Corruption Perception Index, Economy..*

ABSTRAK

Korupsi erat kaitannya dengan kondisi ekonomi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Data sekunder dari tahun 2018-2022 digunakan untuk model regresi data panel di 34 provinsi di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa CPI (*Corruption Preception Index*) sebagai indikator korupsi di Indonesia secara berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, direkomendasikan agar pemerintah dan masyarakat umum dapat berkolaborasi dalam mengupayakan pencegahan korupsi dengan meningkatkan transparansi dan meningkatkan partisipasi publik sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Kata kunci: Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Persepsi Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Indikator untuk penentuan kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemampuan serta keberhasilannya dalam pembangunan negara. Pembangunan negara adalah proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Menurut Husaini (2017) mengatakan bahwa efektivitas dan keberhasilan pembangunan paling utama ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor sumber daya manusia dan pembiayaan. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah orang-orang yang terlibat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan Pembangunan. Dari faktor-faktor yang ada faktor manusia adalah yang paling dominan berpengaruh dalam pembangunan di antara faktor lainnya. Namun peran serta Warga Negara dalam pembangunan di era saat ini atau era reformasi masih menunjukkan kecenderungan belum berjalan dengan sempurna.

Jika dilihat dari kacamata kekayaan sumber daya alam, Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia. Dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya yang begitu melimpah, Indonesia menjelma sebagai paru-paru dunia. Tetapi kekayaan sumber daya alam ini tidak diimbangi dengan Pembangunan negara yang optimal. Ironisnya, dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia, Indonesia bukan termasuk dalam negara yang digolongkan kaya, namun termasuk dalam golongan negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah Indonesia masih tergolong rendah dalam hal kualitas sumber daya manusianya. Kualitas yang dimaksud bukan hanya dilihat dari segi pengetahuan tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya.

Korupsi di Indonesia sudah merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Kutipan Astuti & Chariri, (2015), Korupsi mengakibatkan kerugian secara materiil pada keuangan negara yang sangat besar.

Ada sebuah kutipan dari salah satu pemimpin di negeri ini bernama Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dikenal dengan sebutan Ahok mengatakan bahwa "Anda tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang seperti zaman perjuangan dulu, cukup jangan korupsi saja itu sudah cukup menolong negara kita." Dari kalimat tersebut tercermin bahwa korupsi merupakan salah satu bentuk untuk merusak peradaban negara terutama perekonomian di Indonesia.

Korupsi rasanya sudah mendarah daging di pemerintahan Indonesia. Kondisi di lapangan mencerminkan bahwa korupsi sudah merajalela, ironisnya kegiatan korupsi ini bukan hanya dilakukan per individu namun yang memprihatinkan adalah terjadinya perampasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif. Hal tersebut merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan.

Ini merupakan masalah yang fatal apabila aparatur pemerintahan atau birokrat menunjukkan perilaku yang menyimpang dari kewenangan dan tugas yang telah diatur dalam undang-undangan karena hal tersebut menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai indeks persepsi korupsi rendah. Dilansir oleh *Transparency International*, pada tahun 2022, Indeks persepsi korupsi Indonesia mendapatkan nilai 34 hal ini menurun dari tahun 2021 yang mendapat nilai 38. Dan jika dilihat dari peringkat secara internasional, Indonesia mendapat peringkat 110 dari 180 negara di dunia. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia masih banyak penyakit korupsi itu sendiri.

Sejatinya Pemerintah Indonesia sudah memiliki suatu Lembaga anti korupsi yang berdiri secara independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diharapkan KPK dapat menghentikan dan meredam masifnya korupsi yang terjadi di Indonesia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia mengalami masalah lain yaitu kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pun tergolong masih tinggi. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Terdapat hubungan yang erat antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari sudut pandang masalah lainnya, Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Namun di sisi lain, pemerintah selalu ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai jalur. Dengan demikian diperlukan peninjauan ulang terkait permasalahan korupsi yang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Korupsi

Korupsi berasal dari kata *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kebobrokan atau kerusakan. Selain itu, dipakai juga dalam kaitannya ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan, Dampak yang merusak dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia hasilnya mengatakan bahwa korupsi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang memburuk. Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung tidak langsung korupsi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Alfada (2019).

Di dunia ini, Korupsi diukur dengan menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI). *Transparency International* adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang mempunyai tekad dan semangat untuk memerangi korupsi. Salah satu bentuk hasil kerjanya adalah dengan mempublikasikan secara tahunan terkait hasil survei yang dikenal sebagai CPI atau di Indonesia dikenal dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Dengan survei dapat mengurutkan 180 negara berdasarkan tingkat persepsi masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah).

Grafik 2.1.1 Perkembangan Nilai CPI di Indonesia



Sumber: Data *Transparency International* 2018–2022

Grafik 2.1.1 menunjukkan bahwa Nilai CPI di Indonesia cenderung menurun. Hal ini menggambarkan bahwa sedang maraknya korupsi di Indonesia. Penilaian CPI ini akan sangat berpengaruh pada citra bangsa Indonesia. Nilai CPI akan mempengaruhi peringkat korupsi Indonesia di mata dunia dan berbanding lurus dengan hasil peringkat korupsi sesuai dengan data *Transparency International*.

Grafik 2.1.2 Perbandingan CPI dan Peringkat Korupsi Indonesia



Sumber: Data *Transparency International* 2018–2022

Dari Grafik 2.1.2 menggambarkan bahwa posisi peringkat CPI Indonesia cenderung meningkat dari 2-18 hingga 2022. Hal ini menggambarkan bahwa semakin rendah nilai CPI Indonesia akan membuat peringkat CPI Indonesia akan meningkat. Di sisi lain dalam lima tahun terakhir, kasus korupsi di Indonesia cenderung meningkat dan segaris lurus dengan peningkatan jumlah tersangka di Indonesia

Grafik 2.1.3 Perbandingan Kasus dan Tersangka Korupsi



Sumber: Data ICW

Dalam Grafik 2.1.3 tentang Perbandingan Kasus dan Tersangka Korupsi ini mengalami peningkatan yang signifikan hal ini mempengaruhi nilai CPI Indonesia. Sejalan dengan hal itu, dalam jangka panjang akan mempengaruhi pertumbuhan Indonesia.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

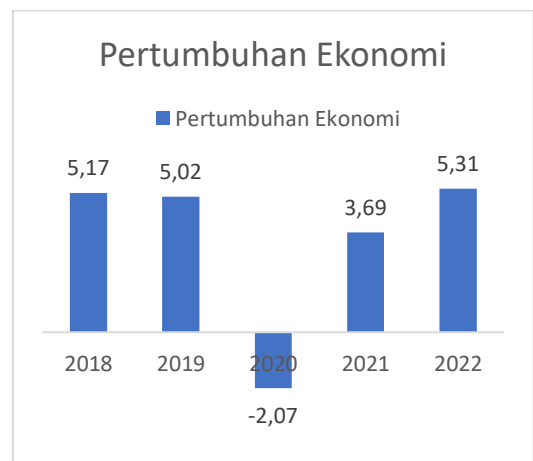
Secara pengertian umum, Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan perekonomian. Besarnya pertumbuhan menunjukkan Kemajuan suatu perekonomian yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional.

Sukirno (2010) berpendapat bahwa, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian menyebabkan

barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi sifatnya adalah kuantitatif di mana hubungannya erat dengan barang dan jasa yang diproduksi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur dengan produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto. Sedangkan untuk Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan.

Grafik 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dalam grafik 2.2.1 pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan hal yang positif. Pada Tahun 2020, pandemi global terjadi di Indonesia yaitu Covid-19, hal ini membuat resesi ekonomi di beberapa negara termasuk Indonesia. Namun Indonesia dapat mengatasinya dan menunjukkan tren yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

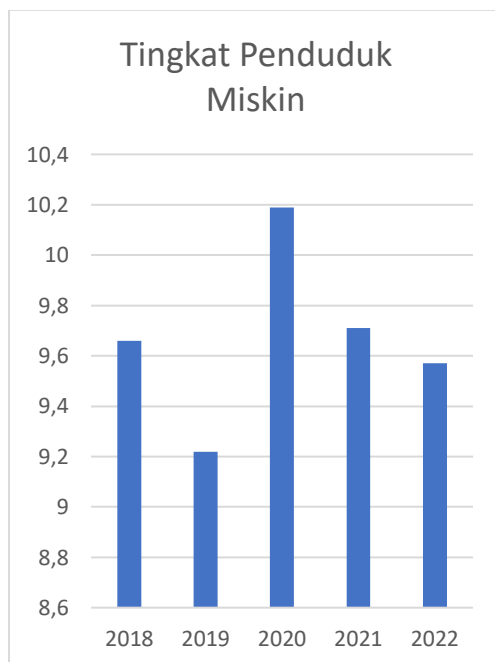
2.3 Kemiskinan

Secara etimologis, "kemiskinan" berasal dari kata "miskin" yang berarti tidak mempunyai harta (finansial maupun benda) dan serba kekurangan. Menurut (Yacoub, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang mendasar, karena kemiskinan berhubungan erat dengan

pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan kemiskinan merupakan masalah besar dihadapi oleh seluruh negara yang ada di dunia.

Dalam mengukur kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Grafik 2.3.1 Tingkat Penduduk Miskin di Indonesia



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dalam grafik 2.3.1 Tingkat Penduduk Miskin di Indonesia memiliki mengalami kenaikan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi yang melanda Indonesia. Namun dalam tiga tahun terakhir, Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang menggambarkan bahwa Indonesia berhasil keluar dari masalah kemiskinan secara perlahan.

Grafik 2.3.2 Perbandingan *Growth* dengan Penduduk Miskin di Indonesia



Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dalam grafik 2.3.2 Perbandingan *Growth* dengan Penduduk Miskin di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini menggambarkan semakin turunnya tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perbandingan *Growth* dengan penduduk miskin di Indonesia saling berhubungan dengan pengaruh yang signifikan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder. Jenis data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa Lembaga seperti BPS, KPK, dan TII. Selain data sekunder yang diperoleh dari lembaga tersebut, data lainya berasal dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, dokumen, maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Sampel data yang digunakan untuk korupsi merupakan data CPI yang dikeluarkan oleh *Transparency International*. CPI mempunyai nilai dari 0 hingga 100. 0 mengindikasikan tingkatan

tindakan yang terjadi sangat korup dan 100 mengindikasikan paling jauh dari korupsi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diperoleh melalui nilai PRDB. Pada penelitian ini, ukuran pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah persentase laju pertumbuhan ekonomi atau persentase laju PDRB (34 provinsi di Indonesia) atas dasar harga konstan 2000.

Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model data panel dengan pendekatan regresi linear sederhana. Untuk melihat pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan, dapat di formulasi sebagai berikut

$$PDRB_{it} = \alpha + \beta(CPI) + TPM_{it}\varepsilon_{it}$$

Keterangan :

PDRB = Produk Domestik Bruto Regional, sebagai variabel dependen

α = Konstanta

CPI = *Corruption Perception Index*, sebagai variabel independen

TPM = Tingkat Penduduk Miskin, sebagai variabel independen

i = Kota dan/atau Kabupaten

β = Koefisien Regresi

t = Waktu

ε_{it} = *Error term condition*

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini pengujian dilakukan menggunakan pendekatan regresi sederhana. Dengan menggunakan variabel-variabel yang telah ditetapkan dihasilkan beberapa hasil uji. Dengan menggunakan pendekatan uji *Chow*, hasil Uji *Chow* mengindikasikan bahwa *Chi-square* memiliki probabilitas 0.0002(<0,05) sehingga model yang digunakan adalah pendekatan model *Fixed Effect* lebih sesuai dibandingkan dengan menggunakan pendekatan model *Common Effect* dalam meneliti korupsi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan model uji lain yang digunakan menggunakan uji *Hausmann*. Dalam Uji *Hausmann*, menunjukkan nilai *Prob. Cross-section random* sebesar 0,0002 (<0,05). Sehingga pendekatan model yang paling sesuai digunakan adalah *Fixed Effect* dalam meneliti

korupsi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil uji dengan menggunakan pendekatan model *Fixed Effect* sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pengujian menggunakan model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	36.63264	10.09925	3.627264	0.0004
CPI	-0.066537	0.152667	-0.435831	0.6637
TPM	-2.895528	0.779971	-3.712355	0.0003

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	3.461792	R-squared	0.335516
Mean dependent var	3.812647	Adjusted R-squared	0.161956
S.D. dependent var	4.259314	S.E. of regression	3.899177
Akaike info criterion	5.744979	Sum squared resid	2037.280
Schwarz criterion	6.409031	Log likelihood	-452.3232
Hannan-Quinn criter.	6.014443	F-statistic	1.933147
Durbin-Watson stat	2.102967	Prob(F-statistic)	0.004041

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dalam tabel 4.1 pengujian dengan pendekatan *Fixed Effect*, menampilkan hasil dari uji estimasi tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018–2022 pada 34 provinsi di Indonesia mencapai 36.63 persen. Hasil pengujian menggunakan pendekatan *Fixed Effect* menunjukkan hasil *Adjusted R Squared* adalah 0,161956. Dengan melihat angkat dalam *Adjusted R Squared* menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh variabel, korupsi dan variabel tingkat penduduk miskin. Sehingga terdapat 0,838044 atau 83% dijelaskan oleh variabel-variabel lain berada di luar variabel yang digunakan dalam hasil uji analisis. Hasil pengujian *R* memberikan informasi seberapa besar variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model regresi data panel. Nilai *R* yang semakin mendekati angka 1, menunjukkan bahwa variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Dalam uji model dengan pendekatan *Fixed Effect*, Variabel Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia CPI memiliki nilai *t-statistic* sebesar -0,435831 dengan nilai *prob.* 0.6637 (> 0.05) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa CPI tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB. Di lain hal, hasil uji menunjukkan variabel TPM memiliki nilai *t-statistic* sebesar -3.712355 dan nilai *prob.* 0.0003(<0.05), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa TPM memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel PDRB

4.2 Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji dengan pendekatan model *Fixed Effect* menunjukkan bahwa pengaruh CPI terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan hasil uji regresi parsial menghasilkan nilai *Prob.* 0.6637(>0.05) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika dilihat dari tanda negatif pada *t-statistic* dalam hasil uji tersebut, variabel CPI menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai indeks Persepsi Korupsi di Indonesia yang memiliki arti persepsi korupsi lebih bersih, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2010) bahwa korupsi tidak berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang juga sejalan dengan ungkapan Dzhumashev (2009) bahwa korupsi memiliki hubungan negatif dan tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat dengan baik menyebabkan semakin banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah melakukan korupsi. Korupsi yang merajalela di Indonesia tentu akan mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi sehingga masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan begitu sebaliknya. Di sisi lain, di negara berkembang seperti Negara Indonesia pada lima tahun terakhir (2018–2022) menunjukkan pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan meningkat. Hal ini akan menimbulkan perluasan kesempatan korupsi bagi oknum-oknum karena seiringnya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan membiaskan terjadinya korupsi di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya transparansi pemerintah terhadap Masyarakat terkait dana yang digunakan.

Di Indonesia, korupsi kerap kali terjadi di bidang perizinan hingga pengadaan barang dan jasa. Para pengusaha di Indonesia menggunakan koneksi dan uang untuk memuluskan perizinan, memanipulasi kebijakan, serta mekanisme pasar. Dalam beberapa pendapat, ada sebagian pihak menyetujui kondisi tersebut dengan alasan bahwa korupsi merupakan "pelumas dalam roda

perekonomian" atau dikenal dengan teori "*grease the wheel*". Mereka berpendapat, menggunakan uang dan koneksi dalam perizinan membuat usaha-usaha lebih mudah berkembang dan cepat dalam produksi. Kondisi ini sering terjadi di Indonesia yang memiliki sistem kelembagaan kurang baik dengan birokrasi yang berbelit.

Di lain hal, hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi memiliki banyak faktor yang harus diperhitungkan. Salah satunya adalah kebebasan ekonomi yang dimiliki oleh sebuah negara. Di negara yang memiliki kebebasan ekonomi yang rendah, korupsi membuat pertumbuhan ekonomi menjadi rendah. Namun di negara yang memiliki kebebasan ekonomi tinggi, korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia memiliki keberagaman dalam penerapan kebebasan ekonomi. Sehingga di Indonesia korupsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Terdapat di beberapa daerah yang memiliki banyak aturan mengikat sehingga bisa dikatakan ekonomi tidak bebas yang berarti kebebasan ekonomi rendah. Begitu pun sebaliknya, terdapat daerah di Indonesia menerapkan peraturan yang sedikit sehingga memiliki kebebasan ekonomi yang tinggi.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil pengolahan data menggunakan pendekatan regresi dengan model *Fixed Effect* menunjukkan hasil bahwa CPI yang digunakan sebagai indikator nilai indeks persepsi korupsi di Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun dalam hal tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia justru sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Dalam pendekatan model yang digunakan hasil uji regresi ini menunjukkan bahwa teori dari Dzhumashev (2009) dan Waluyo (2010) yang berpendapat bahwa korupsi tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal moralitas korupsi seharusnya tidak di benarkan terjadi di Indonesia karena secara psikologi akan mengganggu jalannya reformasi pembangunan nasional yang pada

akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia dalam jangka panjang. Penyakit sosial korupsi ini harus dimusnahkan di Indonesia melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat Indonesia. Secara jabatan ini merupakan tugas pemerintah dan KPK untuk melaksanakan tugas tersebut dengan meningkatkan transparansi serta memberikan hukuman sesuai perundang-undangan yang berlaku bagi pelaku. Meskipun dalam hasil uji ini korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun secara moralitas bangsa maka diperlukannya untuk menekan angka korupsi tersebut.

Peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan data-data yang terbaru serta dapat menambah variabel terikat lainnya atau menggunakan variabel data yang lebih akurat guna mendapatkan hasil pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akman, B., & Sapha A.H, D. (2018). *Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah, 3(4), 531–538.
- Arief, M. O. H. Z. (2015). Tindak Pidana Korupsi Penghambat Laju Ekonomi. Jurnal Jendela Hukum, 2(2), 23–27.
- Badjuri, Achmad. (2011). *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2011, Hal. 84 – 96
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2020–2022*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2017–2019*. Jakarta: BPS.
- Budiningsih, N,. (2020). *Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asean Tahun 2012–2020*. E-Jurnal EP Unud,11[11] : 4193 – 4202.
- Dzhumashev, R. (2009). *Is there a direct effect of corruption on (Issue 18489)*.
- Haqiqi, A., & Putra, H.A., (2020). *Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Jurnal REP Vol 5/ No.2/2020.
- Junaidi. (2017). *Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia*. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 3(1), 2018.
- Khairuddin, dkk. (2022). *Korupsi Mempengaruhi Ekonomi Di Indonesia*. JURNAL IJTIMAIYAH Vol. 6 No. 2 Juli–Desember 2022.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2006). *Memahami Untuk Membasmi : Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. KPK.
- Putri, L., & Triani, M. (2021). *Analisis Hubungan Korupsi, Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Volume 3, nomor 1, March 2021, hal 17–24.
- Rachmawati, Amalia Fadhila. (2021). *Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2021) pp. 12–19.
- Waluyo, Joko. (2010). *Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan : Suatu Studi Lintas Negara*. Buletin Ekonomi Vol 8, No. 2 Agustus 2010 hal 70–170.
- Zainuri, dkk. (2020). *Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN*. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2020, Volume VII (1) : 30–35.
- Abduruohman & Resosudarmo, B. (2012). *Economy-wide Impacts of the 2009 Fiscal Stimulus Package in Indonesia*. Paper dipresentasikan pada the 11th Indonesia Regional Science Association (IRSA) International Conference.